



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); dan
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Purnagunth
PINI WIDYANTINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH
TAHUN 2025

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Badan Pusat Statistik	4.92	A
2	Kementerian Keuangan	4.87	A
3	Kementerian Kesehatan	4.87	A
4	Kejaksaan Agung	4.85	A
5	Kementerian Komunikasi dan Digital	4.80	A
6	Tentara Nasional Indonesia	4.80	A
7	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	4.80	A
8	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	4.80	A
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.80	A
10	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	4.77	A
11	Badan Narkotika Nasional	4.77	A
12	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	4.77	A
13	Badan Kepegawaian Negara	4.76	A
14	Kementerian Dalam Negeri	4.76	A
15	Kemen terian Pertanian	4.75	A
16	Ombudsman Republik Indonesia	4.72	A
17	Kementerian Pekerjaan Umum	4.68	A
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4.67	A
19	Kementerian Sosial	4.66	A
20	Komisi Pemilihan Umum	4.66	A
21	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	4.62	A
22	Kementerian Pariwisata	4.61	A
23	Kementerian Agama	4.61	A
24	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4.61	A
25	Lembaga Administrasi Negara	4.59	A

No	Instansi	Indeks	Kategori
26	Kementerian Luar Negeri	4.58	A
27	Kementerian Hukum	4.58	A
28	Kementerian Perindustrian	4.58	A
29	Kementerian Ketenagakerjaan	4.57	A
30	Kepolisian Negara RI	4.57	A
31	Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI	4.52	A
32	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	4.51	A
33	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	4.51	A
34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.51	A
35	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	4.51	A
36	Badan Standardisasi Nasional	4.47	A-
37	Badan Informasi Geospasial	4.45	A-
38	Kementerian Perhubungan	4.44	A-
39	Arsip Nasional Republik Indonesia	4.44	A-
40	Kementerian Perdagangan	4.43	A-
41	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4.41	A-
42	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	4.41	A-
43	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4.40	A-
44	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.39	A-
45	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	4.37	A-
46	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	4.36	A-
47	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4.36	A-
48	Kementerian Koperasi	4.34	A-
49	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4.34	A-
50	Kementerian Kehutanan	4.33	A-
51	Perpustakaan Nasional	4.30	A-
52	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	4.26	A-
53	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4.25	A-
54	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4.25	A-
55	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	4.22	A-
56	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4.11	A-
57	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4.05	A-
58	Kementerian Sekretariat Negara	4.05	A-
59	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	4.04	A-
60	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	4.03	A-
61	Badan Siber dan Sandi Negara	4.02	A-
62	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.00	B

No	Instansi	Indeks	Kategori
63	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	3.99	B
64	Kementerian Kebudayaan	3.96	B
65	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.93	B
66	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	3.93	B
67	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3.90	B
68	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	3.85	B
69	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	3.85	B
70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.85	B
71	Badan Intelijen Negara	3.85	B
72	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	3.83	B
73	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.82	B
74	Kementerian Transmigrasi	3.81	B
75	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3.78	B
76	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	3.62	B
77	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.62	B
78	Badan Pangan Nasional	3.53	B
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3.48	B-
80	Lembaga Ketahanan Nasional	3.32	B-
81	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.32	B-
82	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3.18	B-
83	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.15	B-
84	Kementerian Hak Asasi Manusia	3.11	B-
85	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.09	B-
86	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.03	B-
87	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.03	B-
88	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.02	B-
89	Kementerian Pertahanan	3.02	B-
90	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.01	B-
91	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	2.93	C
92	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan	N/A	N/A
93	Badan Gizi Nasional	N/A	N/A

B. PROVINSI

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4.75	A
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4.73	A
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4.72	A
4	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	4.71	A
5	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4.69	A
6	Pemerintah Provinsi Bali	4.68	A
7	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4.63	A
8	Pemerintah Provinsi Aceh	4.56	A
9	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4.56	A
10	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4.48	A-
11	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.48	A-
12	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.41	A-
13	Pemerintah Provinsi Banten	4.35	A-
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	4.35	A-
15	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	4.34	A-
16	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.27	A-
17	Pemerintah Provinsi Riau	4.27	A-
18	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.21	A-
19	Pemerintah Provinsi Lampung	4.19	A-
20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.18	A-
21	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	4.17	A-
22	Pemerintah Provinsi Bengkulu	4.11	A-
23	Pemerintah Provinsi Jambi	4.03	A-
24	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4.01	A-
25	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3.97	B
26	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3.96	B
27	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	3.89	B
28	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3.86	B
29	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.70	B
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3.44	B-
31	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	3.17	B-
32	Pemerintah Provinsi Maluku	2.91	C
33	Pemerintah Provinsi Papua	2.79	C
34	Pemerintah Provinsi Papua Barat	N/A	N/A
35	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A
36	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A
37	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A
38	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A

C. KOTA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Kota Surabaya	4.84	A
2	Pemerintah Kota Surakarta	4.80	A
3	Pemerintah Kota Denpasar	4.80	A
4	Pemerintah Kota Depok	4.76	A
5	Pemerintah Kota Bandung	4.73	A
6	Pemerintah Kota Bekasi	4.73	A
7	Pemerintah Kota Pontianak	4.71	A
8	Pemerintah Kota Pasuruan	4.71	A
9	Pemerintah Kota Madiun	4.71	A
10	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4.70	A
11	Pemerintah Kota Balikpapan	4.70	A
12	Pemerintah Kota Cirebon	4.70	A
13	Pemerintah Kota Pekalongan	4.70	A
14	Pemerintah Kota Blitar	4.69	A
15	Pemerintah Kota Batam	4.69	A
16	Pemerintah Kota Bogor	4.69	A
17	Pemerintah Kota Yogyakarta	4.69	A
18	Pemerintah Kota Mojokerto	4.67	A
19	Pemerintah Kota Prabumulih	4.67	A
20	Pemerintah Kota Samarinda	4.67	A
21	Pemerintah Kota Kediri	4.66	A
22	Pemerintah Kota Malang	4.64	A
23	Pemerintah Kota Singkawang	4.63	A
24	Pemerintah Kota Batu	4.62	A
25	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	4.62	A
26	Pemerintah Kota Cimahi	4.61	A
27	Pemerintah Kota Pagar Alam	4.59	A
28	Pemerintah Kota Banjar	4.59	A
29	Pemerintah Kota Medan	4.54	A
30	Pemerintah Kota Bontang	4.53	A
31	Pemerintah Kota Tasikmalaya	4.50	A-
32	Pemerintah Kota Sukabumi	4.50	A-
33	Pemerintah Kota Palembang	4.48	A-
34	Pemerintah Kota Semarang	4.48	A-
35	Pemerintah Kota Padang Panjang	4.47	A-
36	Pemerintah Kota Probolinggo	4.47	A-
37	Pemerintah Kota Banjarmasin	4.45	A-
38	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	4.44	A-
39	Pemerintah Kota Mataram	4.42	A-
40	Pemerintah Kota Salatiga	4.42	A-
41	Pemerintah Kota Pematangsiantar	4.40	A-
42	Pemerintah Kota Tarakan	4.36	A-
43	Pemerintah Kota Payakumbuh	4.35	A-
44	Pemerintah Kota Palangkaraya	4.35	A-
45	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	4.32	A-
46	Pemerintah Kota Lhokseumawe	4.31	A-
47	Pemerintah Kota Metro	4.31	A-

No	Instansi	Indeks	Kategori
48	Pemerintah Kota Bandar Lampung	4.31	A-
49	Pemerintah Kota Tegal	4.28	A-
50	Pemerintah Kota Magelang	4.28	A-
51	Pemerintah Kota Palu	4.23	A-
52	Pemerintah Kota Banda Aceh	4.21	A-
53	Pemerintah Kota Cilegon	4.21	A-
54	Pemerintah Kota Tomohon	4.20	A-
55	Pemerintah Kota Pekanbaru	4.18	A-
56	Pemerintah Kota Bengkulu	4.17	A-
57	Pemerintah Kota Serang	4.16	A-
58	Pemerintah Kota Sabang	4.12	A-
59	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.10	A-
60	Pemerintah Kota Bitung	4.08	A-
61	Pemerintah Kota Ambon	4.06	A-
62	Pemerintah Kota Kupang	4.02	A-
63	Pemerintah Kota Jambi	4.00	B
64	Pemerintah Kota Sibolga	4.00	B
65	Pemerintah Kota Dumai	3.92	B
66	Pemerintah Kota Tangerang	3.90	B
67	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3.90	B
68	Pemerintah Kota Bima	3.84	B
69	Pemerintah Kota Bau Bau	3.83	B
70	Pemerintah Kota Langsa	3.76	B
71	Pemerintah Kota Banjarbaru	3.75	B
72	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.72	B
73	Pemerintah Kota Kotamobagu	3.71	B
74	Pemerintah Kota Manado	3.67	B
75	Pemerintah Kota Gunungsitoli	3.66	B
76	Pemerintah Kota Makassar	3.44	B-
77	Pemerintah Kota Subulussalam	3.39	B-
78	Pemerintah Kota Padang	3.38	B-
79	Pemerintah Kota Parepare	3.33	B-
80	Pemerintah Kota Binjai	3.32	B-
81	Pemerintah Kota Gorontalo	3.19	B-
82	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	3.11	B-
83	Pemerintah Kota Pariaman	3.10	B-
84	Pemerintah Kota Bukittinggi	3.05	B-
85	Pemerintah Kota Kendari	3.04	B-
86	Pemerintah Kota Sawahlunto	3.04	B-
87	Pemerintah Kota Jayapura	2.97	C
88	Pemerintah Kota Solok	2.93	C
89	Pemerintah Kota Ternate	2.72	C
90	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2.66	C
91	Pemerintah Kota Tual	2.45	C-
92	Pemerintah Kota Palopo	N/A	N/A
93	Pemerintah Kota Sorong	N/A	N/A

D. KABUPATEN

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	4.72	A
2	Pemerintah Kabupaten Sleman	4.70	A
3	Pemerintah Kabupaten Batang	4.69	A
4	Pemerintah Kabupaten Jombang	4.69	A
5	Pemerintah Kabupaten Bantul	4.68	A
6	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4.68	A
7	Pemerintah Kabupaten Jember	4.68	A
8	Pemerintah Kabupaten Garut	4.68	A
9	Pemerintah Kabupaten Kediri	4.67	A
10	Pemerintah Kabupaten Magetan	4.67	A
11	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	4.66	A
12	Pemerintah Kabupaten Pemalang	4.66	A
13	Pemerintah Kabupaten Cilacap	4.66	A
14	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	4.66	A
15	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	4.66	A
16	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4.66	A
17	Pemerintah Kabupaten Banjar	4.66	A
18	Pemerintah Kabupaten Bekasi	4.65	A
19	Pemerintah Kabupaten Majalengka	4.65	A
20	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4.64	A
21	Pemerintah Kabupaten Ciamis	4.63	A
22	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	4.63	A
23	Pemerintah Kabupaten Bintan	4.63	A
24	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4.62	A
25	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	4.62	A
26	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	4.61	A
27	Pemerintah Kabupaten Karawang	4.61	A
28	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4.61	A
29	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	4.61	A
30	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	4.60	A
31	Pemerintah Kabupaten Bandung	4.60	A
32	Pemerintah Kabupaten Cirebon	4.60	A
33	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	4.60	A
34	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	4.59	A
35	Pemerintah Kabupaten Banyumas	4.59	A
36	Pemerintah Kabupaten Badung	4.59	A
37	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	4.59	A
38	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	4.59	A
39	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	4.58	A
40	Pemerintah Kabupaten Pinrang	4.58	A
41	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	4.58	A
42	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	4.58	A
43	Pemerintah Kabupaten Balangan	4.57	A
44	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	4.57	A
45	Pemerintah Kabupaten Tegal	4.57	A
46	Pemerintah Kabupaten Sragen	4.56	A

No	Instansi	Indeks	Kategori
47	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	4.56	A
48	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	4.55	A
49	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	4.55	A
50	Pemerintah Kabupaten Klaten	4.54	A
51	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	4.54	A
52	Pemerintah Kabupaten Pacitan	4.52	A
53	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	4.52	A
54	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	4.51	A
55	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	4.51	A
56	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	4.51	A
57	Pemerintah Kabupaten Madiun	4.50	A-
58	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	4.50	A-
59	Pemerintah Kabupaten Blora	4.49	A-
60	Pemerintah Kabupaten Sampang	4.49	A-
61	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	4.49	A-
62	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	4.48	A-
63	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	4.47	A-
64	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	4.47	A-
65	Pemerintah Kabupaten Lumajang	4.47	A-
66	Pemerintah Kabupaten Pasaman	4.47	A-
67	Pemerintah Kabupaten Tabalong	4.46	A-
68	Pemerintah Kabupaten Bogor	4.46	A-
69	Pemerintah Kabupaten Ngawi	4.46	A-
70	Pemerintah Kabupaten Kendal	4.45	A-
71	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	4.45	A-
72	Pemerintah Kabupaten Solok	4.44	A-
73	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	4.44	A-
74	Pemerintah Kabupaten Sumenep	4.44	A-
75	Pemerintah Kabupaten Kuningan	4.43	A-
76	Pemerintah Kabupaten Langkat	4.43	A-
77	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	4.43	A-
78	Pemerintah Kabupaten Purworejo	4.41	A-
79	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	4.41	A-
80	Pemerintah Kabupaten Indramayu	4.41	A-
81	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	4.41	A-
82	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4.40	A-
83	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	4.39	A-
84	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	4.39	A-
85	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	4.38	A-
86	Pemerintah Kabupaten Lingga	4.38	A-
87	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	4.37	A-
88	Pemerintah Kabupaten Paser	4.37	A-
89	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	4.37	A-
90	Pemerintah Kabupaten Semarang	4.36	A-
91	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	4.36	A-
92	Pemerintah Kabupaten Gresik	4.35	A-
93	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	4.35	A-

No	Instansi	Indeks	Kategori
94	Pemerintah Kabupaten Ketapang	4.34	A-
95	Pemerintah Kabupaten Klungkung	4.33	A-
96	Pemerintah Kabupaten Kebumen	4.33	A-
97	Pemerintah Kabupaten Sambas	4.33	A-
98	Pemerintah Kabupaten Nunukan	4.32	A-
99	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4.32	A-
100	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	4.32	A-
101	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	4.32	A-
102	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	4.32	A-
103	Pemerintah Kabupaten Lamongan	4.32	A-
104	Pemerintah Kabupaten Batanghari	4.32	A-
105	Pemerintah Kabupaten Mesuji	4.31	A-
106	Pemerintah Kabupaten Katingan	4.31	A-
107	Pemerintah Kabupaten Berau	4.30	A-
108	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	4.30	A-
109	Pemerintah Kabupaten Kapuas	4.29	A-
110	Pemerintah Kabupaten Asahan	4.28	A-
111	Pemerintah Kabupaten Karimun	4.28	A-
112	Pemerintah Kabupaten Kampar	4.27	A-
113	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	4.27	A-
114	Pemerintah Kabupaten Lahat	4.26	A-
115	Pemerintah Kabupaten Subang	4.26	A-
116	Pemerintah Kabupaten Tapin	4.26	A-
117	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	4.25	A-
118	Pemerintah Kabupaten Magelang	4.25	A-
119	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	4.25	A-
120	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	4.25	A-
121	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	4.24	A-
122	Pemerintah Kabupaten Bangka	4.24	A-
123	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	4.23	A-
124	Pemerintah Kabupaten Bombana	4.23	A-
125	Pemerintah Kabupaten Tangerang	4.22	A-
126	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	4.22	A-
127	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	4.21	A-
128	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	4.20	A-
129	Pemerintah Kabupaten Buleleng	4.20	A-
130	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	4.19	A-
131	Pemerintah Kabupaten Grobogan	4.18	A-
132	Pemerintah Kabupaten Bulungan	4.18	A-
133	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	4.17	A-
134	Pemerintah Kabupaten Malang	4.16	A-
135	Pemerintah Kabupaten Demak	4.15	A-
136	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	4.15	A-
137	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	4.15	A-
138	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	4.15	A-
139	Pemerintah Kabupaten Tuban	4.14	A-
140	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	4.13	A-
141	Pemerintah Kabupaten Blitar	4.12	A-

No	Instansi	Indeks	Kategori
142	Pemerintah Kabupaten Dairi	4.10	A-
143	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	4.10	A-
144	Pemerintah Kabupaten Minahasa	4.09	A-
145	Pemerintah Kabupaten Kudus	4.08	A-
146	Pemerintah Kabupaten Bireuen	4.08	A-
147	Pemerintah Kabupaten Kerinci	4.08	A-
148	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	4.07	A-
149	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	4.07	A-
150	Pemerintah Kabupaten Belitung	4.06	A-
151	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	4.06	A-
152	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	4.05	A-
153	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	4.05	A-
154	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	4.04	A-
155	Pemerintah Kabupaten Temanggung	4.04	A-
156	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	4.03	A-
157	Pemerintah Kabupaten Tabanan	4.02	A-
158	Pemerintah Kabupaten Cianjur	4.02	A-
159	Pemerintah Kabupaten Situbondo	4.02	A-
160	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	4.01	A-
161	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	4.00	B
162	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	3.99	B
163	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	3.99	B
164	Pemerintah Kabupaten Karangasem	3.98	B
165	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3.97	B
166	Pemerintah Kabupaten Simalungun	3.97	B
167	Pemerintah Kabupaten Majene	3.97	B
168	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	3.97	B
169	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	3.96	B
170	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	3.95	B
171	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	3.95	B
172	Pemerintah Kabupaten Sukamara	3.94	B
173	Pemerintah Kabupaten Simeulue	3.93	B
174	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	3.93	B
175	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	3.92	B
176	Pemerintah Kabupaten Sintang	3.91	B
177	Pemerintah Kabupaten Natuna	3.90	B
178	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	3.89	B
179	Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	3.88	B
180	Pemerintah Kabupaten Lebong	3.87	B
181	Pemerintah Kabupaten Gianyar	3.85	B
182	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	3.84	B
183	Pemerintah Kabupaten Konawe	3.83	B
184	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	3.83	B
185	Pemerintah Kabupaten Kaur	3.81	B
186	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	3.81	B
187	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	3.79	B
188	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	3.79	B
189	Pemerintah Kabupaten Agam	3.78	B

No	Instansi	Indeks	Kategori
190	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	3.78	B
191	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	3.78	B
192	Pemerintah Kabupaten Lamandau	3.77	B
193	Pemerintah Kabupaten Bangli	3.76	B
194	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	3.76	B
195	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	3.74	B
196	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	3.74	B
197	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	3.74	B
198	Pemerintah Kabupaten Jepara	3.74	B
199	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	3.74	B
200	Pemerintah Kabupaten Boyolali	3.74	B
201	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	3.74	B
202	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	3.73	B
203	Pemerintah Kabupaten Samosir	3.73	B
204	Pemerintah Kabupaten Nias	3.72	B
205	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	3.72	B
206	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	3.71	B
207	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	3.71	B
208	Pemerintah Kabupaten Serang	3.70	B
209	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	3.69	B
210	Pemerintah Kabupaten Seruyan	3.69	B
211	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	3.68	B
212	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	3.68	B
213	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	3.67	B
214	Pemerintah Kabupaten Karo	3.67	B
215	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	3.66	B
216	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	3.66	B
217	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	3.66	B
218	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	3.65	B
219	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	3.64	B
220	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	3.64	B
221	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	3.63	B
222	Pemerintah Kabupaten Bone	3.63	B
223	Pemerintah Kabupaten Brebes	3.62	B
224	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	3.61	B
225	Pemerintah Kabupaten Soppeng	3.58	B
226	Pemerintah Kabupaten Lembata	3.57	B
227	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	3.56	B
228	Pemerintah Kabupaten Kolaka	3.56	B
229	Pemerintah Kabupaten Mempawah	3.55	B
230	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	3.55	B
231	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	3.55	B
232	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	3.54	B
233	Pemerintah Kabupaten Muko Muko	3.54	B
234	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.51	B
235	Pemerintah Kabupaten Dompu	3.50	B-
236	Pemerintah Kabupaten Melawi	3.50	B-
237	Pemerintah Kabupaten Gowa	3.50	B-
238	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	3.49	B-

No	Instansi	Indeks	Kategori
239	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.48	B-
240	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	3.48	B-
241	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	3.46	B-
242	Pemerintah Kabupaten Seluma	3.46	B-
243	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	3.46	B-
244	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.45	B-
245	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.45	B-
246	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	3.45	B-
247	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	3.43	B-
248	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	3.43	B-
249	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	3.42	B-
250	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	3.41	B-
251	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	3.41	B-
252	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	3.41	B-
253	Pemerintah Kabupaten Sekadau	3.41	B-
254	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	3.41	B-
255	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	3.40	B-
256	Pemerintah Kabupaten Lebak	3.40	B-
257	Pemerintah Kabupaten Pidie	3.38	B-
258	Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.38	B-
259	Pemerintah Kabupaten Landak	3.37	B-
260	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	3.37	B-
261	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	3.37	B-
262	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	3.36	B-
263	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	3.36	B-
264	Pemerintah Kabupaten Toba	3.34	B-
265	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	3.34	B-
266	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	3.33	B-
267	Pemerintah Kabupaten Sigi	3.31	B-
268	Pemerintah Kabupaten Sanggau	3.31	B-
269	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	3.30	B-
270	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	3.27	B-
271	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	3.27	B-
272	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	3.27	B-
273	Pemerintah Kabupaten Malinau	3.27	B-
274	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	3.24	B-
275	Pemerintah Kabupaten Manokwari	3.23	B-
276	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	3.22	B-
277	Pemerintah Kabupaten Muna	3.21	B-
278	Pemerintah Kabupaten Buton	3.21	B-
279	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	3.21	B-
280	Pemerintah Kabupaten Rembang	3.20	B-
281	Pemerintah Kabupaten Siak	3.19	B-
282	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	3.18	B-
283	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	3.16	B-
284	Pemerintah Kabupaten Bima	3.16	B-
285	Pemerintah Kabupaten Ende	3.15	B-
286	Pemerintah Kabupaten Merangin	3.15	B-

No	Instansi	Indeks	Kategori
287	Pemerintah Kabupaten Tolikara	3.15	B-
288	Pemerintah Kabupaten Buru	3.14	B-
289	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	3.13	B-
290	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.13	B-
291	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	3.08	B-
292	Pemerintah Kabupaten Manggarai	3.08	B-
293	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	3.06	B-
294	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.04	B-
295	Pemerintah Kabupaten Barru	3.02	B-
296	Pemerintah Kabupaten Sinjai	3.01	B-
297	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	3.00	C
298	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	2.96	C
299	Pemerintah Kabupaten Pati	2.96	C
300	Pemerintah Kabupaten Boalemo	2.95	C
301	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2.95	C
302	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2.94	C
303	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	2.94	C
304	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	2.92	C
305	Pemerintah Kabupaten Tebo	2.91	C
306	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	2.90	C
307	Pemerintah Kabupaten Fak Fak	2.90	C
308	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	2.90	C
309	Pemerintah Kabupaten Mamasa	2.89	C
310	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	2.88	C
311	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	2.85	C
312	Pemerintah Kabupaten Poso	2.84	C
313	Pemerintah Kabupaten Morowali	2.83	C
314	Pemerintah Kabupaten Alor	2.81	C
315	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2.81	C
316	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	2.79	C
317	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	2.79	C
318	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	2.79	C
319	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	2.78	C
320	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	2.77	C
321	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	2.77	C
322	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	2.76	C
323	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	C
324	Pemerintah Kabupaten Mamuju	2.74	C
325	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	2.73	C
326	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	2.72	C
327	Pemerintah Kabupaten Banggai	2.71	C
328	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	2.69	C
329	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	2.69	C
330	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.67	C
331	Pemerintah Kabupaten Belu	2.65	C
332	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	2.64	C
333	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	2.62	C
334	Pemerintah Kabupaten Maros	2.60	C
335	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2.59	C

No	Instansi	Indeks	Kategori
336	Pemerintah Kabupaten Wajo	2.59	C
337	Pemerintah Kabupaten Ngada	2.59	C
338	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.57	C
339	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	2.56	C
340	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	2.56	C
341	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	2.55	C
342	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	2.54	C
343	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	2.54	C
344	Pemerintah Kabupaten Jembrana	2.53	C
345	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	2.52	C
346	Pemerintah Kabupaten Buol	2.50	C-
347	Pemerintah Kabupaten Sikka	2.49	C-
348	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	2.47	C-
349	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	2.44	C-
350	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	2.43	C-
351	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	2.42	C-
352	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	2.41	C-
353	Pemerintah Kabupaten Jayapura	2.41	C-
354	Pemerintah Kabupaten Kaimana	2.40	C-
355	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	2.35	C-
356	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2.31	C-
357	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2.30	C-
358	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	2.28	C-
359	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	2.27	C-
360	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	2.26	C-
361	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	2.25	C-
362	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	2.19	C-
363	Pemerintah Kabupaten Bungo	2.18	C-
364	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	2.18	C-
365	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2.18	C-
366	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	2.14	C-
367	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	2.13	C-
368	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	2.10	C-
369	Pemerintah Kabupaten Donggala	2.06	C-
370	Pemerintah Kabupaten Merauke	2.06	C-
371	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2.03	C-
372	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.01	C-
373	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	1.99	D
374	Pemerintah Kabupaten Kupang	1.97	D
375	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	1.96	D
376	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	1.96	D
377	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	1.84	D
378	Pemerintah Kabupaten Sorong	1.83	D
379	Pemerintah Kabupaten Takalar	1.76	D
380	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	1.54	D
381	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	1.38	E
382	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	1.16	E

No	Instansi	Indeks	Kategori
383	Pemerintah Kabupaten Mappi	1.13	E
384	Pemerintah Kabupaten Nduga	N/A	N/A
385	Pemerintah Kabupaten Malaka	N/A	N/A
386	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	N/A	N/A
387	Pemerintah Kabupaten Supiori	N/A	N/A
388	Pemerintah Kabupaten Asmat	N/A	N/A
389	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	N/A	N/A
390	Pemerintah Kabupaten Deiyai	N/A	N/A
391	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	N/A	N/A
392	Pemerintah Kabupaten Enrekang	N/A	N/A
393	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	N/A	N/A
394	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	N/A	N/A
395	Pemerintah Kabupaten Keerom	N/A	N/A
396	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	N/A	N/A
397	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	N/A	N/A
398	Pemerintah Kabupaten Luwu	N/A	N/A
399	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	N/A	N/A
400	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	N/A	N/A
401	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	N/A	N/A
402	Pemerintah Kabupaten Maybrat	N/A	N/A
403	Pemerintah Kabupaten Mimika	N/A	N/A
404	Pemerintah Kabupaten Nabire	N/A	N/A
405	Pemerintah Kabupaten Paniai	N/A	N/A
406	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	N/A	N/A
407	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	N/A	N/A
408	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	N/A	N/A
409	Pemerintah Kabupaten Puncak	N/A	N/A
410	Pemerintah Kabupaten Sarmi	N/A	N/A
411	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	N/A	N/A
412	Pemerintah Kabupaten Tambrau	N/A	N/A
413	Pemerintah Kabupaten Toli Toli	N/A	N/A
414	Pemerintah Kabupaten Waropen	N/A	N/A
415	Pemerintah Kabupaten Yalimo	N/A	N/A

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN
DAERAH TAHUN 2025

KATEGORI PENILAIAN HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Keterangan:

N/A adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

